BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup menjadi bagian dari masyarakat Madura di Surabaya membuat peneliti merasa prihatin terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi di seputar mereka. Salah satu persoalan yang membuat peneliti tertarik adalah anak-anak Madura. Selama ini anak-anak Madura dikenal oleh masyarakat sebagai anak yang "nakal". Para guru yang mengajar di sekolah sekitar wilayah domisili masyarakat Madura hafal dengan keluhan sesama guru yang mengajar di sekolah lain, yang juga berada di lokasi konsentrasi masyarakat Madura.

Sebenarnya kenakalan yang terjadi pada anak-anak Madura hanyalah akibat dari pola pendidikan yang diterapkan orang tua dan guru, khususnya guru ngaji. Pada dasarnya hak-hak mereka sebagai seorang anak kurang diperhatikan, sehingga mereka secara tidak langsung terpinggirkan, baik oleh orang tua, maupun oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Adapun yang dimaksud dengan anak-anak dalam hal ini adalah pribadi-pribadi yang sanggup berinteraksi dengan sumber daya dan sejarah, yang perasaan dan opini individualnya sungguh sangat berharga.[1]

---

[1] Victoria Johnson (eds.), *Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis* (Yogyakarta : REaD, 2001), hal. 7. Mengutip dari Judith Ennew, *Street and Working Children : A Guide to Planning* (London : SCF Development Manual 4, 1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kampung Sombo yang menjadi lokasi riset ini adalah sebuah kampung Madura (mayoritas masyarakat Madura) yang terletak di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya. Lokasi tersebut merupakan perbatasan Kecamatan Semampir yang bersebelahan dengan Kecamatan Simokerto. Mayoritas masyarakat memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah, meskipun mereka dikelilingi oleh gudang-gudang milik golongan atas masyarakat Madura juga. Hampir separuh penduduk bertempat tinggal di rumah-rumah kontrakan yang sempit dengan tingkat sanitasi yang kurang layak. Kondisi perekonomian mereka tentu saja berimbas pada anak-anaknya. Terlebih lagi tingkat pendidikan orang tua yang minim secara tak langsung telah membuat anak-anak terpinggirkan dalam keluarga. Anak-anak kurang memiliki kesempatan untuk berbagi pandangan dan perasaannya mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka untuk selanjutnya dapat membuat keputusan tentang kepentingan terbaik mereka. Pada kenyataannya kebutuhan penting anak-anak juga kurang dilihat dan dipertimbangkan. Anak-anak juga terkadang menerima perlakuan dan perkataan yang kasar dari orang tuanya.

Salah satu hak anak Madura yang seringkali dilanggar adalah kesempatan memperoleh pendidikan dalam suasana yang hangat dan penuh kasih sayang. Anak-anak mendapat perlakuan kasar dari orang tua dan guru-gurunya, baik dalam pendidikan formal maupun informal. Mereka dituntut untuk menjadi anak yang patuh, diam, dan tidak boleh banyak bertingkah. Anak-anak membutuhkan dukungan dan apresiasi penuh agar mereka bisa bebas mengungkapkan pandangan dan pemikirannya, serta mengembangkannya. Jika tidak, maka sulit bagi mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk tumbuh dewasa dengan kesadaran kritis. Bahkan, bisa jadi mereka akan tumbuh dewasa dan menjadi bagian dalam permasalahan kehidupan.

Para orang tua hampir tidak pernah berbicara dari hati ke hati pada anak-anak mereka, sehingga komunikasi interaktif anak dan orang tua hampir tidak pernah terbangun. Terlebih lagi seorang anak yang tengah mengalami *broken home* dan hidup di tengah keluarga yang saling bermusuhan. Baginya, perhatian dan kasih sayang merupakan barang langka yang amat berharga.

Masalah ekonomi juga membuat para orang tua hanya mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga SD maupun SMP. Sekolah yang menjadi tujuan mereka pun memiliki kualitas yang kurang baik. Pendidikan yang anak-anak Sombo terima di sekolah tidak jauh beda dengan pola pendidikan yang mereka dapatkan di rumah. Para guru menjadi pusat pembelajaran dan murid-murid menjadi obyek. Guru menjadi atasan otoriter yang harus dipatuhi. Murid-murid dianggap tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan, maka harus diceramahi secara sepihak. Dengan mengatasnamakan disiplin anak-anak Sumbo dididik dengan pukulan dan hukuman. Proses belajar mengajar pun berlangsung sangat kaku dengan bangku-bangku yang berderet rapi. Tak heran jika anak-anak merasa malas dan kurang bergairah untuk belajar di sekolah. Media pembelajaran yang minim serta guru yang kurang kreatif dalam menyampaikan pelajaran membuat anak-anak kesulitan menangkap pelajaran. Hal itu disebabkan oleh pembelajaran yang kurang menyentuh realitas sehari-hari. Jika anak-anak dihadapkan pada realitas, anak-anak akan mudah memahami pelajarannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesampainya di rumah, mereka belajar bersama orang tuanya dengan cara yang sama. Pukulan, cubitan, perkataan kasar, dan bahkan cacian pun sering mereka terima jika mereka tidak dapat belajar dengan benar. Akibatnya mereka menjadi tertekan secara psikis. Tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri. Hal yang sangat disayangkan adalah anak-anak harus kehilangan rasa keingintahuan dan antusiasme untuk mengeksplorasi hal-hal di sekitarnya. Padahal, anak-anak adalah ilmuwan alami. Mereka selalu bereksperimen, menarik hipotesis, menguji hipotesis, dan mengeluarkan kesimpulan hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang disebutnya pengetahuan. Jika masa emas anak-anak tidak didukung dan diapresiasi dengan baik, bukan tidak mungkin mereka akan tumbuh dewasa dan tergilas oleh struktur masyarakatnya sendiri.

Selain pendidikan, masalah kesehatan juga mengancam anak-anak Sombo. Sebagian orang tua tidak mau mengimunisasikan anak-anaknya. Para orang tua itu menganggap imunisasi menyebabkan anaknya sakit. Padahal kesehatan adalah bagian dari hak anak yang harus dipenuhi guna kelangsungan hidup yang baik bagi anak-anak.

Kondisi ekonomi orang tua yang pas-pasan membuat anak-anak putus sekolah. Ditambah lagi mahalnya biaya pendidikan, membuat anak-anak orang miskin semakin termarginalkan. Hal itu mendorong orang tua mereka untuk tidak menyekolahkan anaknya setelah lulus SD dan menyuruh anak-anaknya membantunya bekerja. Sebagian anak-anak memiliki keinginan sendiri untuk bekerja, namun hal tersebut tetap saja disebut merampas hak-hak anak karena pemilik pabrik dan usaha malah memperbolehkan anak-anak bekerja demi meraih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan. Upaya eksploitasi anak-anak tersebut merupakan bagian dari *trafficking*.

Definisi *trafficking* sendiri menurut Persatuan Bangsa-bangsa yakni perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran dan atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang untuk berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.[2] Definisi lain, eksploitasi disini termasuk melacurkan orang lain, bentuk-bentuk lain eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Sebagai pada seorang anak, eksploitasi dipandang sebagai *trafficking* terhadap manusia, bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satupun cara yang dikemukakan dalam definisi di atas.[3] Dengan demikian, *trafficking* tidak hanya merujuk pada perdagangan dan penculikan anak.

Hal-hal di atas merupakan sepotong gambaran permasalahan marginalisasi anak-anak, khususnya anak-anak Madura. Anak-anak yang polos saat ini harus menjadi korban himpitan ekonomi orang tuanya. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa anak-anak adalah manusia masa depan. Potensinya

---

[2] Humas Pemda Sambas, *Kebijakan Pemda Tangani Trafficking*, http://www.sambas.go.id, diakses tanggal 23 April 2009.

[3] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu dikembangkan secara penuh. Kesadaran kritis mereka perlu ditumbuhkembangkan agar mereka sensitif dalam melihat ketimpangan dalam struktur dan sistem masyarakatnya, sehingga diharapkan kelak mereka bisa menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik dari masa sekarang. Berdasarkan urgenisitas masalah-masalah tersebut, maka peneliti memutuskan untuk memilih upaya penyadaran masyarakat terhadap hak-hak anak sebagai tema riset aksi. Selanjutnya, mengapa peneliti memilih pendekatan riset aksi atau yang biasa dikenal dengan *Participatory Action Research* akan peneliti jelaskan dalam bagian selanjutnya.

B. Fokus Riset

Fokus permasalahan dalam riset adalah sebagai berikut :

a) Apa yang terjadi pada anak-anak Madura di Kampung Sumbo?
b) Bagaimana marginalisasi anak-anak Madura terjadi?
c) Mengapa marginalisasi anak-anak Madura terjadi?
d) Upaya apa yang bisa dilakukan untuk mendampingi mereka?

C. Analisis Situasi

Peliknya persoalan marginalisasi anak-anak memerlukan upaya ekstra untuk menyelesaikannya. Proses pemecahan masalah yang tepat sasaran membutuhkan analisis situasi permasalahan hingga pada akarnya. Untuk memudahkan dalam memahami masalah marginalisasi anak-anak, maka peneliti menyajikan analisis pohon masalah yang menguraikan penyebab dan akibat dari permasalahan tersebut. Hal ini tergambar sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melakukan riset pendahuluan, peneliti menyimpulkan bahwa marginalisasi anak adalah masalah inti. Akibat yang ditimbulkan adalah anak-anak putus sekolah, terjadinya kenakalan anak, dan anak-anak menjadi malas belajar. Pada puncaknya, munculnya pekerja anak sebagai akibat dari putusnya sekolah, tindak kriminalitas sebagai akibat dari kenakalan anak, dan rendahnya pengetahuan anak sebagai akibat dari anak-anak malas belajar.

Masalah utama yang menyebabkan marginalisasi anak antara lain: Pertama, kurangnya kesadaran keluarga akan pentingnya penghormatan dan pemenuhan hak-hak anak. Yang kedua, anak-anak sendiri tidak sadar bahwa hak-hak mereka kurang terpenuhi sehingga mereka hanya pasrah menerima apa yang terjadi dengan mereka. Ketiga, para ustadz dan kiai yang berperan sebagai pendidik anak-anak Madura belum memahami hak-hak anak dalam perspektif Islam. Hak-hak anak tidak luput dari perhatian agama Islam, hanya saja hal itu tidak diikuti dengan internalisasi dan implementasi para pemeluknya, khususnya para kiai dan ustadz yang dikenal sebagai tokoh sentral di dalam pendidikan agama. Keempat, metodologi pendidikan yang digunakan para guru dalam sektor pendidikan formal maupun informal kurang memberdayakan murid-murid karena guru bertindak sebagai pusat pembelajaran. Kelima, masalah utama yang terakhir adalah berkenaan dengan aspek hukum dan politik, yakni lemahnya sistem penegakan UU perlindungan anak.

Penyebab utama dari masalah utama di atas adalah kurangnya pemahaman keluarga dan para guru akan hak-hak anak, anak-anak belum mengetahui apa yang menjadi hak-hak mereka, perekonomian keluarga yang pas-pasan, para kiai dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ustadz belum pernah belajar mengenai hak-hak anak dalam perspektif Islam, kurangnya pemahaman para guru tentang hak-hak anak, dan lemahnya pengetahuan guru tentang metodologi pendidikan yang membebaskan. Penyebab utama dari aspek politik dan hukum antara lain terjadinya perbedaan persepsi dalam penanganan pelanggaran UU perlindungan anak, belum terbentuknya aparat pemerintah khusus yang menangani upaya perlindungan anak, dan tumpang tindihnya kebijakan perlindungan anak dengan kebijakan liberalisasi ekonomi dan pendidikan.

Faktor-faktor yang turut mempengaruhi permasalahan di atas antara lain: Pertama, kurangnya pendidikan kritis tentang pentingnya penghormatan dan pemenuhan hak-hak anak. Kedua, kurangnya pengembangan sektor ekonomi strategis yang sesuai dengan kondisi lokal guna menyangga pendapatan keluarga agar senantiasa dapat memenuhi hak-hak dasar anak. Ketiga, belum adanya pendidikan Islam yang transformatif tentang hak-hak anak. Keempat, belum adanya pendidikan kritis dan pendampingan anak-anak. Kelima, belum adanya pendidikan kritis dan pendampingan yang menjangkau para guru. Keenam, kurangnya intensifikasi pelatihan para guru untuk peningkatan kualitas SDM mereka. Ketujuh, pemerintah kurang memiliki komitmen yang kuat dalam mengatasi pelanggaran UU perlindungan anak. Kedelapan, di dalam aparat-aparat penegak hukum sendiri kurang terjalinnya koordinasi dalam rangka sosialisasi UU perlindungan anak. Aparat-aparat tersebut perlu didudukkan jadi satu untuk menyamakan persepsi tentang upaya perlindungan anak serta hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Kesembilan, kurangnya kesadaran para elite politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pemegang kebijakan akan pentingnya perlindungan anak-anak karena menyangkut nasib masa depan bangsa. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai persoalan marginalisasi anak-anak Madura urban, peneliti akan menyajikannya pada bab lain.

D. Harapan Pemecahannya

Harapan pemecahan masalah-masalah tersebut di atas adalah kebalikan dari kondisi-kondisi tersebut. Hirarkhi analisis masalah yang ada selanjutnya dirubah menjadi kondisi positif sebagai harapan dari proses pendampingan. Sebagai tujuan utama adalah terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak-anak rajin belajar, tidak putus sekolah, dan tidak terjadinya kenakalan anak-anak. Akumulasi harapan akhirnya adalah tidak adanya pekerja anak, anak-anak memiliki SDM yang mumpuni (pengetahuan luas), dan anak-anak bisa menghindarkan diri dari tindak kriminal. Hasil yang ingin dicapai adalah keluarga dan para pendidik di sektor formal maupun informal menyadari pentingnya pemenuhan hak-hak anak, anak-anak tahu dan sadar jika hak-hak mereka telah dirampas, para pendidik di sektor formal maupun informal menggunakan metode pendidikan yang membebaskan, serta kuatnya sistem penegakan UU perlindungan anak. Untuk lebih jelasnya, maka peneliti akan sajikan pohon harapan dan tujuan proses pendampingan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang tercantum dalam pohon masalah dan harapan, maka persoalan-persoalan utama dan harapan yang diinginkan dapat terangkum dalam matrik berikut :

No.	Aspek	Permasalahan	Harapan Pemecahan Masalah
1.	SDM	- Orang tua dan guru kurang memiliki pengetahuan kritis tentang pentingnya penghormatan dan pemenuhan hak-hak anak serta dampak negatif marginalisasi anak. - Para guru tidak memiliki pengetahuan tentang pendidikan yang membebaskan. - Anak-anak tidak memiliki pengetahuan kritis tentang hak-hak mereka serta pemenuhannya demi masa depan cerah mereka.	- Orang tua dan guru memiliki pengetahuan kritis tentang pentingnya penghormatan dan pemenuhan hak-hak anak serta dampak negatif marginalisasi anak. - Para guru memiliki pengetahuan tentang pendidikan yang membebaskan. - Anak-anak memiliki pengetahuan kritis tentang hak-hak mereka serta pemenuhannya demi masa depan cerah mereka.
2.	Sosial	Tidak terpenuhinya hak-hak anak	Terpenuhinya hak-hak anak
3.	Budaya	Kurangnya kesadaran budaya masyarakat untuk	Perubahan kesadaran budaya masyarakat untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		menghormati dan memenuhi hak-hak anak.	menghormati dan memenuhi hak-hak anak.
4.	Politik	Pemerintah kurang mendukung kebijakan publik yang pro pada pelaksanaan perlindungan hak-hak anak.	Pemerintah mendukung kebijakan publik yang pro pada pelaksanaan perlindungan hak-hak anak.
5.	Hukum	Lemahnya sistem penegakan UU perlindungan anak.	Kuatnya sistem penegakan UU perlindungan anak.

E. Rencana Aksi / Strategi Program

1. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan matrik permasalahan dan harapan pemecahannya, maka peneliti akan menempuh strategi sebagai berikut :

No.	Aspek	Harapan Pemecahan Masalah	Strategi Program
1.	SDM	- Orang tua dan guru memiliki pengetahuan kritis tentang pentingnya penghormatan dan pemenuhan hak-hak anak serta dampak negatif marginalisasi anak. - Para guru memiliki pengetahuan tentang pendidikan yang	Membentuk kelompok belajar melalui pelatihan *skill*, pemutaran film dokumenter, diskusi tentang kasus-kasus sosial, membentuk kelompok belajar anak melalui pembentukan sanggar anak yang berorientasi pada praksis seni penyadaran yang fleksibel dan menyenangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		membebaskan. - Anak-anak memiliki pengetahuan kritis tentang hak-hak mereka serta pemenuhannya demi masa depan cerah mereka.	
2.	Sosial	Terpenuhinya hak-hak anak	Melakukan analisis persoalan, merancang program aksi bersama masyarakat dan anak-anak, melibatkan stakeholders.
3.	Budaya	Perubahan kesadaran budaya masyarakat untuk menghormati dan memenuhi hak-hak anak.	Mengembangkan diskusi-diskusi kelompok belajar masyarakat, melakukan pendekatan dengan tokoh agama dan masyarakat.
4.	Politik	Pemerintah mendukung kebijakan publik yang pro pada pelaksanaan perlindungan hak-hak anak.	Melakukan pendekatan dan kerja sama kelembagaan dengan aparat pemerintah terkait, dialog dan lobi-lobi dengan aparat pemerintah terkait, dan melibatkan partisipasi anak-anak dalam proses pembuatan keputusan dalam konteks yang memungkinkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			secara institusional.
5.	Hukum	Kuatnya sistem penegakan UU perlindungan anak.	Melakukan kerja sama dengan aparat-aparat penegak hukum dan melakukan koordinasi untuk menyamakan persepsi tentang penanganan pelanggaran UU perlindungan anak.

2. Fokus Rencana Aksi

Mengingat luasnya aspek yang hendak dicakup dan terbenturnya dengan kebutuhan dan waktu peneliti untuk penyelesaian skripsi, maka rencana aksi akan difokuskan pada aspek keluarga. Rencana aksi yang hendak dilaksanakan berupa praksis penyadaran masyarakat terhadap hak-hak anak namun difokuskan pada keluarga-keluarga yang ada di RT 01 RW 09 Kampung Sumbo Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya. Dalam hal ini kelompok masyarakat yang dicakup adalah kelompok ibu-ibu dan anak-anak. Untuk menjaga kelanjutan dari proses perubahan, maka perlu memunculkan *local leader*. Adapun rencana aksi yang lain akan dilanjutkan setelah penulisan skipsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id